

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebuah penelitian yang terfokus pada pola rekrutmen partai politik dalam pemilu serta pemilihan legislative DPRD DKI Jakarta tahun 2019, Penulis mengambil beberapa tinjauan pustaka sebagai bagian penelitian terdahulu yang relevan dalam keselarasan dan kesamaan penelitian untuk suatu keterlibatan partai dengan penerapan pola rekrutmen partai politik di pemilu 2019.

Literature Review

Pertama; Penelitian Terdahulu berupa skripsi Oleh Erwin Pasaribu, dengan judul penelitian Pola Rekrutmen Calon Legislatif 2019 Oleh Partai Solidaritas Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera, mengemukakan bahwa berdasarkan analisis yang dilakukan didalam penelitian, rekrutmen caleg DPRD Sumatera Utara yang dilakukan oleh DPW PSI Sumatera Utara adalah rekrutmen yang dilakukan secara terbuka, kemudian dilakukan juga berbagai tahapan seleksi untuk melihat potensi-potensi dari calon tersebut apakah memenuhi kriteria kepemimpinan. Dilakukan juga pendidikan politik serta berbagai pelatihan untuk kader yang kemudian diseleksi dan dipersiapkan untuk menjadi calon anggota legislatif, ada 3 tahapan seleksi untuk menetapkan calon anggota legislatif yaitu evaluasi dokumen, evaluasi kompetensi, dan evaluasi sosialisasi. Dalam beberapa tahapan tersebut dilibatkan juga tim seleksi yang terdiri dari akademisi, LSM, dan jurnalis yang bertujuan untuk membuat proses rekrutmen yang dilakukan oleh

DPW PSI Sumatera Utara menjadi rekrutmen yang terbuka dan transparan kepada masyarakat.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian diatas menganalisis bagaimana pola rekrutmen terhadap calon anggota legislatif di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di DPW PSI Sumatera Utara. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah DKI Jakarta, di DPW PSI DKI Jakarta. Perbedaan wilayah ini yang membuat penelitian akan memiliki hasil yang dapat jauh berbeda dikarenakan karakteristik daerah, begitu juga karakter dari pimpinan partai di daerah masing-masing, hingga perbedaan masyarakat dan kriteria kepemimpinan dari calon anggota legislatif membuat kebijakan pola rekrutmen dapat berbeda.

Penelitian yang penulis lakukan akan fokus pada pola rekrutmen yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia, dari mulai proses rekrutmen kader hingga rekrutmen calon anggota legislatif, penulis juga akan fokus pada tantangan dan hambatan melakukan pola rekrutmen calon anggota legislatif di DPW PSI DKI Jakarta.

Kedua; Penelitian relevan terdahulu lainnya, Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019 oleh Teguh Adi Prasajo. Mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang sangat berarti bagi kehidupan demokrasi. Salah satu rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik adalah rekrutmen calon legislatif. Dalam hal melakukan rekrutmen politik, ada berbagai

pola yang dilakukan oleh partai politik. Dalam penelitian ini dibahas pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Golkar, seperti yang kita ketahui bahwa Partai Golkar adalah salah satu yang telah terbukti baik melakukan proses rekrutmen, banyak kader berkualitas yang pernah dimiliki oleh partai Golkar.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk salah satu anggota tim seleksi dan beberapa calon legislatif yang telah terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS). Dengan metode penelitian ini ada beberapa informasi yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan yaitu khususnya DPD Golkar Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan lebih kepada calon internal partai dibandingkan dengan calon dari luar partai. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme rekrutmen DPP Partai Golkar sampai ke DPRD Kabupaten/Kota telah terangkum dalam keputusan DPP. Berdasarkan hasil penelitian ini pun bisa akhirnya menyimpulkan bahwa pola rekrutmen caleg dilakukan oleh DPD Golkar Jawa Tengah sudah terbuka. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah perbedaan partai politik yang melakukan rekrutmen beserta wilayahnya. Dengan begitu, dapat dilihat bagaimana perbedaan pola rekrutmen partai Golkar, partai yang sudah berdiri sejak lama dengan Partai Solidaritas Indonesia yang terbilang baru dan pertama kali mengikuti pemilu di tahun 2019.

Ketiga; Penelitian relevan terdahulu lainnya, Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang oleh Hendri Ariwibowo, Budi Setiyono, Ph.D , Dra. Rina Martini, M.Si,

mengemukakan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif untuk pemilu 2014 yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang atas perintah DPP Partai. Dengan aturan dan perintah tersebut, bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif harus melalui proses pendaftaran, penjaringan, test administrasi, penyaringan dan penugasan hingga melakukan tes untuk mengetahui sejauh mana calon anggota legislatifnya mendalami ideologi partai.

Yang membedakan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah perbedaan partai politik yang sangat berbeda. PDIP sebagai partai lama dan tua tentunya sudah memiliki pola rekrutmen yang kuat dan menjadi pedoman selama bertahun-tahun partai itu berdiri, dan terbukti memiliki kader dan pengurus yang kuat berkat pola rekrutmen tersebut. PSI sebagai partai yang terbilang baru, tentu harus mencari terobosan baru dalam pola rekrutmen, PSI harus berani menunjukkan kepada masyarakat sistem rekrutmen yang mereka miliki mampu menjawab persoalan kepemimpinan di tingkat daerah dan nasional. Untuk bisa memahami dengan mudah sebuah literature review yang ditulis diatas dalam penjelasan beberapa pustaka penelitian, penulisan membuat hasil analisis dengan menyusun dalam bagian table sebagai berikut:

Tabel 2.1 Literatur Review

NO	Nama Penulis, Tahun, dan Judul Jurnal/ Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Teori	Hasil Studi/ Penelitian	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Penulis.
1.	<p>Penelitian Terdahulu skripsi Oleh Erwin Pasaribu, dengan judul penelitian Pola Rekrutmen Calon Legislatif 2019 Oleh Partai Solidaritas Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera</p>	<p>Sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pola Rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia dalam menentukan Calon Legislatif yang berkontestasi di Pileg 2019.</p>	<p>Menggunakan sebuah metode penelitian kualitatif analisis dekstritif dalam pengolahan pengumpulan data secara wawancara, dan data valid yang peroleh</p>	<p>Teori rekrutmen politik menjadi grand teori pada penelitian ini memiliki keikutsertaan kader dan partai dalam mendapatkan elektabilitas pada pileg 2019</p>	<p>Hasil penelitian yang mendapatkan keikutsertaan partai dan kader dalam menjalankan pola rekrutmen partai politik, yang sangat berarti bagi kehidupan demokrasi. Salah satu rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik adalah rekrutmen calon legislatif. Dalam hal melakukan rekrutmen politik, ada berbagai pola yang dilakukan oleh partai politik.</p>	<p>Persamaan penelitian dengan penulis Pola Rekrutmen Partai Solidaritas Indonesia sebagai fungsi pencalonan bagi calon legislative partai, fungsi yang di gunakan dalam menrik suara masyarakat melalui penerapan pemilu guna menaikkan elektabilitas partai dan calon legislative yang bertarung. perbedaan grand teori Pola rekrutmen lebih terlihat pada partai politik ini, sedang pada</p>

						<p>penelitian penulis memiliki fokus teori Partai Politik yang menjadi hal utama dalam melihat fungsi partai sebagai penyambung suara masyarakat serta mengkomodir segala kalangan untuk terlibat pada pileg 2019 DKI Jakarta, baik secara turun langsung menjadi caleg PSI maupun pendukung partai di luar structural partai.</p>
2.	<p><i>Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dari Partai Golkar Untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019 oleh Teguh Adi Prasajo.</i></p>	<p>Mengemukakan bahwa rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang sangat berarti bagi kehidupan demokrasi. Salah satu rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik adalah rekrutmen</p>	<p>Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif analisis dalam mendapatkan gambaran secara sistematis, factual dan akurat</p>	<p>Teori Perbandingan Politik anatar partai A dan B dalam kontestasi Politik di pemilihan legislatif</p>	<p>Hasil penelitian yang memperoleh peranan sebuah peranna partai dalam menentukan arah dan perkemabnagn partai melalui keikutseraan sebagai peserta di pemilu.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yang dapat terlihat jelas ialah dengan penelitian penulis ialah menelisik secara kasat mata dan penulisan data yang di lakukan dalam peran nan partai untuk merekrut calon legislatif serta</p>

		<p>calon legislatif. Dalam hal melakukan rekrutmen politik, ada berbagai pola yang dilakukan oleh partai politik.</p>				<p>menaikkan elektabilitas partai..</p>
<p>3.</p>	<p><i>Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang oleh Hendri Ariwibowo, Budi Setiyono, Ph.D , Dra. Rina Martini, M.Si,</i></p>	<p>bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif untuk pemilu 2014 yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Semarang atas perintah DPP Partai. Dengan aturan dan perintah tersebut, bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif harus melalui proses pendaftaran, penjangkaran, test administrasi, penyaringan dan penugasan hingga melakukan tes untuk mengetahui sejauh mana calon anggota legislatifnya mendalami ideologi partai</p>	<p>Menggunakan sebuah metode kualitatif deskriptif, secara lapangan dengan pengelolaan data mentah yang di dapat secara kasar</p>	<p>Menggunakan pola rekrutmen partai dalam melihat konstetasi politik untuk mencapai kemenangan pada caleg yang dimiliki.</p>	<p>Hasil penelitian yang mampu di lihat pada sebuah peranan partai politik sebagai wadah utama para kontestasi serta para pemilik hak suara untuk menentukan pilihannya.</p>	<p>Sebuah persamaan penelitian terletak pada, penggunaan akses kekuasaan yang di miliki melalui pendektaan emosial serta primordial dalam berpolitik</p> <p>Dengan memiliki perbedaan pada sebuah fokus dan teori yang di gunakan dalam menjadikan sebuah grand teori</p>

2.2 Kerangka Teori

1.2.1. Partai Politik

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan berwawasan nasional yang tinggi. Pemimpin yang mempunyai kualitas ini tidak hanya mengarah kepada kepentingan dari partai politik yang diwakili.¹ Partai politik secara nyata memiliki posisi yang sangat strategis dan menentukan serta menjadi elemen penting dalam demokrasi. Partai dalam posisi yang sentral dalam menyatukan berbagai kepentingan ke dalam legislasi dan kebijakan publik. Salah satu peran penting partai politik juga dalam hal ini adalah menjadi penyalur orang-orang yang memiliki kompetensi menjadi seorang anggota legislatif melalui pola rekrutmen politik partai itu sendiri.²

Dalam sistem politik, partai politik menjadi bagian yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas baik. Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab ini, partai politik perlu mengembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik yang ada didalam internalnya. Dengan adanya sistem ini, nantinya partai politik akan dengan mudah dapat melakukan seleksi kesesuaian antara karakter kandidat dengan nilai-nilai prinsip dan ideologi partai politik yang menjalankan sistem rekrutmen tersebut.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.404

² Gun Gun Heryanto, *Problematika Komunikasi Politik* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal. 330.

Tentunya orang-orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut, siapapun orangnya dan apapun latar belakang orang tersebut seharusnya partai politik mampu membuka ruang dan kesempatan yang sama untuk melakukan tahapan seleksi rekrutmen politik dengan utuh.

Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para ahli ilmu klasik dan kontemporer. Mendefinisikan partai politik adalah tugas yang sekilas tampak relatif sederhana. Pada 1984, ilmuwan politik Robert Huckshom memberikan sebuah definisi tentang partai di dalam bukunya yang berjudul *Political Parties in America*: "*Partai Politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan*". Bagi Huckshom, *raison d'etat* untuk memiliki partai politik adalah sederhana. Partai politik adalah sarana yang diperlukan untuk memenangi pemilu dan memimpin pemerintahan.

Mendefinisikan apa itu partai politik dan fungsi apa yang harus diembannya merupakan tugas yang hampir mustahil untuk bisa objektif. Sebaliknya, tugas itu bersifat normatif, dan jawaban yang diberikan oleh para ilmuwan politik berbeda dari waktu ke waktu.

Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut:

Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap

pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil.³

Menurut Anthony Dows (1957): Dalam arti luas, partai politik adalah koalisi orang-orang yang berusaha menguasai aparat pemerintahan dengan cara yang sah. Yang kita maksud dengan koalisi adalah sekelompok individu yang memiliki tujuan tertentu yang sama dan saling bekerja sama untuk mencapainya. Yang kita maksud dengan aparat pemerintahan adalah perangkat fisik, hukum, dan kelembagaan yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan peran khusus dalam pembagian kerja. Yang kita maksud dengan cara yang sah adalah pengaruh yang melembaga atau sah.⁴

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, *Modern Political Parties*, mengemukakan definisi sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.⁵

³ Hendri Ariwibowo, Budi Setiyono, Rina Martini, "Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pdi Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang", *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2013. Hal. 4.

⁴ Richard S.Katz dan William Cortty, *Hand Book Partai Politik*, Penerbit Nusa Media, Agustus 2014, hal. 4

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.404

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara besar yang dapat menghubungkan kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan yang resmi. Meskipun definisi dari para ilmuwan politik berbeda-beda dan banyak yang telah bertahan sepanjang zaman, definisi itu tetap kontroversial

Di lain sisi, partai politik memiliki fungsi lain yaitu menyebarluaskan dan terus membicarakan rencana serta kebijakan dari pemerintah. Dengan begitu terjadi perpindahan informasi dan dialog, dari atas ke bawah dan sebaliknya. Partai politik menjalankan peranan sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran penghubung tersebut sangat penting untuk menjelaskan kebijakan pemerintah kepada semua elemen masyarakat, dan juga pemerintah harus mendengar dan tanggap terhadap berbagai suara dan tuntutan dari masyarakat.

Partai politik menjalankan peran yang unik dan penting dalam sistem pemerintahan demokrasi. Partai memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem pemerintahan yang memungkinkan terpilihnya sejumlah besar jabatan publik. Partai politik menyatukan kelompok yang beragam sebagai satu kekuatan yang padu, menjadi penghubung yang dibutuhkan antara tingkat pemerintahan yang berbeda-beda, serta menjamin keseimbangan yang berlangsung melebihi masa jabatan. Partai juga menjalankan fungsi penting dalam mendorong partisipasi aktif dalam politik, menuntut politisi bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta mendorong debat dan diskusi tentang isu penting.

Tujuan Partai politik adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan/mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Adanya sekelompok orang yang berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya atas suatu wilayah dan memiliki kesamaan pandangan mereka akan membentuk suatu Organisasi Masyarakat (Ormas). Ormas inilah yang berkembang menjadi partai politik. Dengan kata lain sebagian orang membentuk partai politik untuk memiliki kuasa atau wewenang atas suatu wilayah dengan cara mencari massa. Itulah tujuan dibentuknya suatu partai politik.

1) Tujuan Partai Politik secara umum adalah sebagai berikut:

a. Partai politik memiliki tujuan untuk dapat menggapai cita-cita nasional dari sebuah bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan idealnya adalah untuk seluruh bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Tidak peduli akan adanya perbedaan suku, bahasa, agama dan lainnya.

b. Menjaga dan merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik didirikan untuk memelihara persatuan suatu bangsa, bukanlah untuk memecah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, segala tindakan yang sifatnya mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dilarang.

c. Partai politik didirikan memiliki tujuan untuk meningkatkan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat di dalam Negara Republik Indonesia. Dengan adanya partai politik, tingkat kehidupan

demokrasi dapat berkembang sehingga kedaulatan dari rakyat, dan untuk rakyat dapat tercapai serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

1.2.2. Rekrutmen Politik

Rekrutmen Politik memiliki peran yang penting dalam sebuah negara, karena dari proses rekrutmen politik ini ditentukannya orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik melalui lembaga yang ada pada suatu negara. Kualitas rekrutmen politik akan menentukan tercapai atau tidaknya suatu sistem politik. Rekrutmen politik memiliki fungsi yang sangat penting bagi partai politik.

Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik. Field dan Siavelis menjelaskan fungsi rekrutmen politik ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik.

Menurut Ramlan Subakti, rekrutmen politik meliputi pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang untuk melakukan sejumlah peranan dalam pemerintahan dan sistem politik.⁶ Partai politik mempunyai cara dan karakter masing-masing dalam melakukan rekrutmen politik terutama dalam sistem prosedural yang dilakukan. Proses rekrutmen ini juga menjadi ajang untuk menjaring orang yang memiliki kriteria kepemimpinan dan kemampuan untuk ikut aktif dalam kegiatan politik.

⁶ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1999) hal. 25

Partai politik harus melaksanakan cara melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan menjadi pengurus partai politik harus diubah dan lebih berorientasi pada masalah bangsa dan negara. Selain itu, proses pengkaderan dan muatan-muatan politis yang diberikan kepada mereka harus diubah. Perlu ditanamkan kesadaran bahwa mereka merupakan bagian dari bangsa dan negara, dan bahwa di pundak mereka terdapat segudang permasalahan bangsa dan negara yang harus diselesaikan.

Proses pengrekrutan partai memiliki sifat khusus dalam tafsirannya, misalnya untuk pengrekrutan administratif diperlukan suatu dasar patronase (lindungan) dalam proses pengrekrutannya, dalam arti faktor kedekatan seseorang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh pengaruh terutama ketika proses pemilihan pemimpin partai. Rekrutmen politik meliputi aspek: subyek politik dalam arti manusia, dan obyek politik dalam arti partai politik. Rekrutmen politik partai dapat dilakukan dengan cara-cara yang diinginkan partai baik secara terbuka maupun tertutup. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat di butuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dibagi menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang

memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik.

Salah satu fungsi partai politik menyangkut peran mereka sebagai pintu utama dalam mencalonkan calon untuk jabatan di semua tingkat pemerintahan. Rekrutmen politik bukan hanya soal pencalonan wakil-wakil terpilih di tingkat lokal, regional, nasional, dan daerah tetapi juga pengisian berbagai patronase untuk jabatan publik. Proses perekrutan ke jabatan yang dipilih dan diangkat secara luas dianggap sebagai salah satu fungsi terpenting bagi partai, dengan konsekuensi ada potensi konflik internal partai, komposisi parlemen dan pemerintah, dan akuntabilitas anggota terpilih.⁷

Menurut Rush dan Althoff, sistem rekrutmen politik terbagi menjadi dua yaitu :

1. Pola Rekrutmen Terbuka

Pola Terbuka yaitu dengan memberikan kesempatan terbuka kepada siapapun untuk ikut berpartisipasi dan bersaing dalam proses rekrutmen. Yang menjadi dasar penilaian juga melalui proses yang sudah ditentukan melalui pertimbangan yang objektif rasional. Dimana orang yang telah memenuhi syarat

⁷ Richard S.Katz dan William Cortty, *Hand Book Partai Politik*, Penerbit Nusa Media, Agustus 2014, hal. 148

untuk menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat dapat berkompetisi dengan kesempatan yang sama.

2. Pola Rekrutmen Tertutup

Pola Tertutup ialah kesempatan yang dimiliki setiap orang untuk menduduki jabatan politik tidaklah sama atau hanya orang tertentu saja yang dapat mengisi posisi jabatan politik.

2.3 Kerangka Pemikiran

Untuk dapat mengetahui bagaimana pola rekrutmen dan prosedur rekrutmen untuk calon anggota legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta, beserta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan rekrutmen politik, didalam penelitian ini menggunakan teori partai politik dan pola rekrutmen politik.



1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

